

KONSTRUKSI MANTAN TAHANAN POLITIK 1965 DI SURABAYA TERHADAP PANCASILA

Chaharudin Mahkota Budi

12040254069 (Prodi S-1 PPKn, FISH, UNESA) chaharudin69@gmail.com

Agus Satmoko Adi

0016087208 (Prodi SI PPKn, FIS, UNESA) agussatmokoadi@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konstruksi mantan Tahanan Politik 1965 yang ada di Surabaya terhadap Pancasila. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Lokasi penelitian dilakukan di Surabaya. Jumlah informan yang menjadi sumber data berjumlah tiga orang ditetapkan menggunakan teknik snowball sampling. Sumber data diperoleh dari mantan Tahanan Politik 1965 yang ada di Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila dipahami sebagai dasar Negara, ideologi yang digali dari sifat dan watak bangsa Indonesia, dilengkapi dengan irisan dari dua ideologi besar dunia waktu itu yakni liberalisme dan Komunisme. Tapol mendapat pengetahuan tentang Pancasila dari berbagai media seperti Koran, radio, buku dan diskusi. Tapol menganggap bahwa Pancasila mengalami perubahan dibanding dahulu, Pancasila dianggap lebih sempit daripada yang seharusnya, yaitu menjadi konsep hidup.

Kata Kunci: Konstruksi, Pancasila, Mantan Tahanan Politik 1965

Abstract

The purpose of this research is to describe the construction by former political prisoner 1965 in Surabaya against Pancasila. The method used is qualitative of descriptive, the technique of data collection is doing by in dept interview. Location of this research in Surabaya. The total of informant whom to be data resource are amount three people assigned by snowball sampling technique. Data resource is collected by former Political Prisoner 1965 in Surabaya. This research using theory of social construction by Peter L. Berger. The result of this research is show that Pancasila understood as a basic state, ideology extracted from nature and character of Indonesian nation, equipped with sliced by two of biggest ideology in the world on that is liberalism and communism. Former of political prisoner get the knowledge about Pancasila from various media such as newspaper, radio, book and discussion. Former political prisoner assume that Pancasila have change than past time, pancasila considered narrower than which should, that to be concept of life.

Keywords: Construction, Pancasila, Former Political Prisoner 1965.

PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Ir. Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah Negara Indonesia. Pancasila adalah landasan dalam berperilaku dan juga menjadi dasar atas segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila". Ideologi Pancasila yang telah dibuat dan disetujui bersama oleh pendiri bangsa membuat posisi Pancasila sangat kokoh sebagai ideologi Negara.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai penyelewengan dalam aktualisasi nilai-nilainya. Penyelewengan pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya (Darmodihardjo, 1985:144). Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam *ideologi tengah* di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, yaitu liberalisme dan Komunisme. Sehingga sering disifatkan bahwa Pancasila bukan berpaham Komunisme maupun berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme maupun kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi maupun berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang

merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara.

Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak November 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia mengubah sistem politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan Pancasila bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro Liberalisme. Penyimpangan ini dikoreksi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini berarti haluan politik negara dirubah. Pancasila yang sebelumnya berada di samping kanan digeser dan digerakan ke kiri. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan pro ke Kiri dengan dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta- Pyong Yang. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangannya pemerintahan Orde Lama (Ir.Soekarno) dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru (Jenderal Suharto).

Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh regim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi Kiri dan anti Barat menariknya ke posisi Kanan. Namun regim Orde Baru pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945, Ia dianggap cenderung ke praktik Liberalisme-kapitalistik dalam mengelola negara. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangannya regim Orde Baru telah muncul 4 regim Pemerintahan Reformasi sampai saat ini. Pemerintahan-pemerintahan regim Reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru.

Dalam berbagai era Pancasila, salah satu yang paling menarik untuk disoroti adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini sering disebut sebagai suatu percobaan pemberontakan terhadap Pancasila terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Gerakan yang populer sebagai pemberontakan orang-orang Komunis terhadap Negara dan Pancasila ini memiliki implikasi

yang tidak sederhana. Dari adanya gerakan ini muncullah stigma buruk terhadap ajaran Marxis dan ideologi Komunis, selain itu gerakan ini juga menciptakan pemberangusan terhadap orang-orang yang dituduh Komunis baik mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak.

Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai dengan jumlah suara terbanyak ke 4 pada pemilu 1955. PKI mengklaim memiliki lebih dari 2 juta kader di tanah air. Pada umumnya basis dari masa PKI adalah kaum petani dan buruh, selain itu para pelajar serta seniman-seniman juga merupakan loyalis dari PKI. Sebagai partai pemenang ke 4 dalam pemilu pertama tersebut, PKI mengalami pasang surut dalam membawa faham Komunis di Indonesia. PKI pernah tercatat hampir musnah saat melakukan pemberontakan kepada pemerintah hindia Belanda pada tahun 1926, hampir separuh dari anggota partai ditangkap, ditahan dan dibuang (Notosusanto, 1981a:68). Setelah peristiwa tersebut hanya tersisa sedikit dari anggota partai yang masih bisa menjalankan kegiatan organisasi, akan tetapi pada faktanya PKI bukanlah partai yang dengan mudah bisa dihilangkan oleh pemerintah hindia Belanda. Perlahan-lahan PKI membangun kekuatan kembali, para tokoh yang dulu dibuang, diasingkan dan melarikan diri ke luar negeri satu persatu mulai kembali dengan membawa faham Komunisme yang lebih matang. Dinamika politik dan ketidakstabilan perpolitikan Indonesia saat awal merdeka membuat PKI yang diisi oleh orang-orang radikal revolusioner membuat langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang radikal dan terkadang merugikan dirinya sendiri. Peristiwa madiun 1948 dimana gubernur provinsi jawa timur terbunuh adalah peristiwa yang dianggap didalangi oleh orang-orang kiri waktu itu, ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjalankan perjanjian-perjanjian dengan Belanda menjadi latar belakang peristiwa tersebut. Setelah peristiwa tersebut terjadi, sekali lagi dalam perjalanannya, PKI mengalami surut dalam perpolitikan Indonesia.

Pada pemilu 1955 PKI menduduki peringkat ke 4. Pada pemilu pertama ini terdapat 260 kursi anggota dewan dan 520 kursi untuk anggota konstituante. Hasil dari pemilu 1955 menghasilkan data sebagai berikut: Partai Nasional Indonesia mendapat 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante, Masyumi mendapat 57 kursi DPR dan 112 Kursi Konstituante, Nahdlatul ulama mendapat 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante dan Partai Komunis Indonesia mendapat 35 kursi DPR dan 80 kursi konstituante

Inilah awal mula PKI mulai membangun lagi pengaruh dan kuasanya, pada era ini PKI menjalin hubungan yang baik dengan pemerintahan Soekarno.

Partai Komunis menjadi salah satu penyokong dan pendukung Soekarno yang loyal, paham Komunis pun semakin tumbuh subur di tanah air. Hal ini sedikit demi sedikit membawa Indonesia lebih condong ke arah blok timur daripada blok barat. Sikap presiden Soekarno yang memang anti imperialisme dan kolonialisme yang dahulu dibawa oleh Negara barat membuat semangat kebarat-baratan dan liberalisme semakin ditekan, sementara itu paham sosialis dan Komunisme mampu membaca situasi ini dan mengambil peluang untuk menyebarkan ajarannya kepada rakyat tanah air. Tahun 1950-1960 menjadi titik puncak kinerja PKI sebagai partai Komunis, berbagai macam organisasi sayap dan agitasi-agitasi mampu memperkokoh posisi PKI sebagai partai. Negara Indonesia yang baru merdeka pun sedikit demi sedikit semakin menjauh dari barat dan merapat ke nagara-negara sosialis.

Pada masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1955, presiden Soekarno mengambil langkah yang demikian aktif dalam rangka mendapatkan dukungan dari PKI sebagai kekuatan untuk mengimbangi ketakutannya terhadap angkatan darat (AD). Dua tahun kemudian atau pada tahun 1957 PKI membuat garis-garis besar tentang kerjasama antara pemerintah dengan PKI dan khususnya menunjukkan sikap-sikap PKI terhadap kerjasama semacam itu. Hubungan erat antara pemerintah dengan PKI ternyata tidak menjadi akhir yang bagus seperti yang diharapkan orang-orang Komunis pada masa itu. Beberapa kebijakan yang dilakukan PKI dalam perjalanan selanjutnya merupakan batas akhir sejarah partai tersebut. Beberapa faktor seperti ketidakakuran dengan angkatan darat yang semakin meruncing dan panasnya perang dingin yang tidak berakhir membawa partai tersebut pada akhir sejarahnya yang dibangun 15 tahun terakhir. Rex Alfred Mortimer (1974) seperti dikutip Peter Edman (2015: 176) mencatat bahwa pada masa-masa sebelum 1 Oktober 1965 terlihat dimana para pemimpin partai menjadi semakin menyadari keadaan mereka yang kini harus berhadapan dengan partai lain dan dengan pihak militer. Dengan demikian meskipun PKI masih membina hubungan baik dengan pemerintah yang masih bisa melindungi dirinya, namun PKI tidak bisa menutup mata bahwa mereka memiliki berbagai keterbatasan dan harus menjalankan aktivitasnya dengan hati-hati.

Konflik antara PKI dan Angkatan Darat semakin meningkat dengan dilontarkannya usulan pembentukan angkatan kelima. Konflik tersebut juga semakin memburuk dengan munculnya serangan-serangan terbuka terhadap elite Angkatan Darat yang berkaitan dengan gaya hidup mereka yang penuh dengan kemewahan maupun sikap-sikap reaksioner yang mereka tampilkan (Mortimer dalam Edman, 2015: 177). Di tengah-tengah

situasi yang demikian menegangkan tersebut, presiden Soekarno tiba-tiba dikabarkan jatuh sakit. Perihal sakitnya presiden ini pada gilirannya memunculkan desas-desus mengenai kemungkinan terjadinya perubahan mendadak atas keseimbangan kekuatan yang ada pada saat itu, dan memaksa PKI untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang aman demi menghadapi sebuah kemungkinan yang dapat terjadi. PKI mengeluarkan sebuah pernyataan yang pada waktu itu dimuat di *Harian Rakjat* edisi 31 Agustus 1965 mengenai diperlukannya suatu sikap yang penuh dengan kewaspadaan, sementara itu pada sisi lain para pemimpin angkatan darat pun mulai menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara teratur guna membicarakan berbagai perkembangan yang terjadi. Desas-desus tentang adanya sebuah dewan jenderal yang memiliki rencana menggulingkan pemerintahan pun semakin luas tersebar, dan PKI menyambut desas-desus ini dengan kritik-kritik terbuka yang kian meningkat, walaupun pada akhirnya keberadaan dewan jenderal yang sesungguhnya tidak pernah terbukti. Isu tersebut hanya merujuk pada dua bukti: pertama, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pimpinan PKI. Kedua, telegram Gilchrist yang dikirimkan oleh kantor kedutaan besar inggris di Indonesia kepada kantor kementerian luar negerinya.

Sejumlah teori kemudian bermunculan setelah peristiwa G 30 S terjadi. Teori-teori ini diungkapkan oleh sejumlah peneliti dan pemerhati politik internasional, spektrum teori-teori tersebut dimulai dari yang menyatakan adanya keterlibatan PKI sebagai perencana dan pihak yang terlibat langsung dalam rencana kudeta tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Guy Pauker, dan Arnold C. Brackman (Edman, 2015: 47). Sampai dengan teori yang menyatakan adanya suatu gerakan yang disebabkan oleh berbagai ketidakpuasan yang ditujukan kepada para elit militer, yang terutama dikemukakan oleh Benedict Anderson dan Ruth T. McVey (Roosa, 2008: 47). Pemerintah Orde Baru dalam perjalanannya cenderung lebih condong kepada teori yang pertama daripada teori yang kedua, namun teori lain yang menarik adalah teori yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut didalangi oleh Soeharto sendiri demi memenuhi ambisi-ambisinya (Wertheim dalam Edman, 2015: 52). Setiap penafsiran atas peristiwa berdarah tersebut memiliki kelebihan masing-masing, akan tetapi apa yang sesungguhnya telah terjadi sepertinya tidak dapat lagi benar-benar diketahui, terutama karena tersangka utamanya telah menemui banyak yang meninggal, sementara berbagai pengakuan dari banyak pihak lainnya kebenarannya amat diragukan. Terdapat pula analisis yang menempatkan Soekarno sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut (Antonie dalam Edman, 2015: 54). keterangan-keterangan resmi

yang juga telah banyak dipublikasikan cenderung dinilai tidak akurat atau terkesan penuh rekayasa, dan tingkat kepercayaannya pun masih dipertanyakan. Satu hal yang dapat dipastikan dari simpang siur kabar dan berbagai tafsir tersebut adalah bahwa peristiwa berdarah 1965 adalah puncak dari ketegangan politik yang melibatkan berbagai pihak demi kepentingan yang hingga kini masih dipertanyakan.

Tidak lama setelah peristiwa G 30 S terjadi, pada bulan Juli 1966 jaksa agung mengumumkan bahwa orang-orang sipil yang ditahan adalah sejumlah 120.000 orang dan belum termasuk dari golongan angkatan bersenjata. Pada tahun 1967 para tahanan politik 1965 tersebut dimasukkan dalam beberapa kategori, yaitu: Golongan A, yang dianggap terlibat langsung dengan peristiwa G 30 S. Golongan B, yang dianggap aktif mendukung PKI dan arena itu terlibat secara tidak langsung dalam G 30 S. Golongan C ialah mereka yang sekadar menjadi anggota organisasi massa PKI tanpa memainkan peranan kepemimpinan yang aktif. Tahanan politik adalah suatu hal yang pada masa Orde Baru ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, selain itu pemerintah Orde Baru juga beranggapan bahwa tahanan politik 1965 adalah orang-orang yang bermasalah dengan ideologi Pancasila atau tidak Pancasila.

Permasalahan peristiwa G 30 S tidak berhenti sampai dikeluarkannya TAP MPRS No. XXV/1966 tentang dilarangnya paham marxis berkembang di Indonesia. Implikasi dari peristiwa tersebut juga berdampak pada kehidupan mantan Tahanan Politik (Tapol) pasca selesai ditahan. Dikarenakan anggapan yang menyebar luas tentang bekas-bekas PKI yang merupakan pemberontak, maka perlahan-lahan muncullah stigma buruk di masyarakat tentang orang-orang yang dituduh terlibat dalam peristiwa tersebut. Pemerintah Orde Baru pun tidak selesai dengan menghukum para Tapol dengan hukuman kurungan selama bertahun-tahun, namun juga memberi sanksi politik dan administratif pada mantan Tapol yang telah bebas. Sanksi-sanksi yang cukup diskriminatif diantaranya beberapa peraturan bersih diri, Kode Eks Tapol (ET), Kode Organisasi Terlarang (OT), Wajib lapor kepada kantor keamanan dan Tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum

Sanksi-sanksi tersebut hanyalah sebagian kecil dari sanksi diluar tahanan yang diberikan pemerintah kepada mantan Tapol. Dari sanksi-sanksi tersebut maka perlahan memunculkan anggapan di masyarakat bahwa mantan Tapol adalah orang yang kurang bersih, hal ini lebih lanjut berdampak kepada timbulnya sanksi sosial yang diberikan masyarakat terhadap mantan Tapol tersebut. Dari data yang dihimpun dari berbagai sumber, masih terdapat diskriminasi-diskriminasi masyarakat terhadap mantan Tapol. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya kasus

pengucilan pada waktu lalu, ditolaknya kehadiran mantan Tapol di kampung halamannya sendiri, dibubarkan secara sepihak pembahasan-pembahasan dan diskusi-diskusi ilmiah oleh mantan Tapol, ditolaknya pembongkaran kuburan keluarga Tapol yang terbunuh pada tahun 65'. Hal seperti ini memberikan dampak tekanan psikis dan batin kepada mantan Tapol. Diskriminasi-diskriminasi tersebut dikarenakan "cap" pemberontak yang masih abadi sampai sekarang terhadap mantan Tapol. Anggapan bahwa Tapol adalah orang-orang yang mengkhianati Pancasila membuat masyarakat membenci dan mengucilkan mereka.

Berangkat dari hal tersebutlah, maka penulis tertarik mengungkap konstruksi mantan Tapol terhadap nilai-nilai Pancasila. Mempertanyakan nilai-nilai Pancasila menurut pandangan mantan Tapol akan sekaligus menjawab stigma yang masih ada di masyarakat, apakah mantan Tapol adalah benar pemberontak yang mengkhianati Pancasila, ataukah mereka hanya sekadar korban dari peristiwa masa lalu yang belum terungkap sepenuhnya. Mengingat kebanyakan dari mantan Tapol adalah orang-orang yang menjadi pelaku sejarah secara langsung di masa lalu, maka kebanyakan dari mereka tentunya mengikuti perkembangan Pancasila secara lebih utuh, dari dicetuskannya Pancasila hingga hari ini. Dari jawaban mantan Tapol nanti maka diharapkan sedikit demi sedikit diskriminasi terhadap mereka bisa dihentikan dan nama mereka yang dicap buruk selama bertahun-tahun bisa baik kembali. Penelitian ini difokuskan kepada mantan Tapol yang ada di Surabaya, hal ini karena di Surabaya sendiri terdapat mantan Tapol dari kelas A hingga kelas C (data kontras 2015) sehingga jawaban dari mereka bisa menjadi menginterpretasikan pandangan dari mantan Tapol 1965.

METODE

Penelitian menggunakan design kualitatif dengan sifat deskriptif. Bogdan dan Tylor menyebutkan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (LJ. Maelong, 2011:4).

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi konstruksi nilai pancasila oleh mantan Tapol 65, maka menggunakan strategi penelitian studi kasus. Strategi Penelitian studi kasus merupakan strategi dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Stake:1995 dalam crasswel, edisi ketiga:20).

Sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu diperoleh dari informan penelitian. Informan penelitian yaitu mantan tahanan politik pada tahun 1965

yang berada di Surabaya. Informan penelitian adalah orang yang pernah menjadi tahanan politik seputar peristiwa 1965. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tergantung pada kejenuhan data dalam penelitian. Oleh karena itu Creswell (2009:286) mengatakan bahwa kedalaman yang dimunculkan dalam penelitian kualitatif ini lebih berhubungan dengan kekayaan informasi dan kecocokan konteks apa yang ingin diketahui oleh peneliti daripada tergantung pada jumlah sampel.

Penetapan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key informan*, dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti mengungkapkan kriteria tertentu sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel. Kriteria tersebut yakni tahanan politik tahun 1965, sehingga memudahkan peneliti dalam pencarian data terkait konstruksi nilai-nilai Pancasila dengan begitu akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Data penelitian dalam penelitian ini berupa data deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan penelitian tidak berupa angka dan memo dari peneliti. Moleong menyatakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data data berasal dari naskah yang berupa hasil wawancara, catatan dilapangan, dan memo dari penulis (2007:11).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan terkait dengan data konstruksi nilai-nilai Pancasila yaitu wawancara. Dapat dilakukan melalui *face to face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka melalui telepon, atau melalui group diskusi yang membutuhkan pertanyaan –pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat *open-ended* (terbuka) untuk memunculkan pandangan dan opini partisipan (Cresswell, edisi ketiga: 267). Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan informan penelitian (Tahanan politik 1965) secara *face to face interview* untuk mengeksplorasi data yang sedang diteliti sehingga dapat diuraikan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Jenis wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dengan tujuan agar informan mengungkapkan lebih terbuka dengan pendapat dan ide-idenya (Sugiyono:320). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini tidak membatasi dengan menunjukkan batasan pertanyaan yang tetap, akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat

berkembang. Selain itu, jawaban informan tidak ada salah atau benar.

Langkah pertama dalam menganalisis data adalah dengan mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, akan dilakukan pemilihan secara selektif yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Analisis data model interaktif terdapat 3 (tiga) tahap yakni adalah Tahap reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2009:246). Reduksi data dilakukan setelah memperoleh data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan. Selanjutnya memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema. Dengan kemudian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam dan mempermudah untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan. Tahap kedua dalam analisis data model interaktif adalah penyajian data (*data display*). Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel dan sejenisnya.

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif (Sugiyono, 2013:341). Penelitian ini menyajikan teks naratif yang menggambarkan objek yang diteliti. Tahap terakhir analisis data model interaktif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013:345). Peneliti mencari data lain yang mendukung terkait dengan penelitian konstruksi nilai-nilai Pancasila oleh tahanan politik 1965 di Surabaya, supaya kesimpulan awal yang bersifat sementara dapat dibuktikan dengan data yang dikumpulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahanan Politik atau Tapol adalah orang-orang yang dianggap bersalah dan melanggar hukum karena kegiatan

atau aktivitas Politik yang bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Dalam hal ini Tahanan Politik 1965 adalah orang-orang yang ditahan karena terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atau dianggap terlibat oleh pemerintah dalam peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S/PKI). Istilah ini baru berkembang dalam masyarakat seiring dengan perkembangan bagian-bagian hukum pidana politik, hukum pidana ekonomi, hukum pidana lingkungan, dan lain-lain. Tahanan politik dapat diartikan seseorang yang dikenakan tindakan penahanan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana politik. Dengan demikian istilah Tapol memiliki makna ganda. Pertama, status calon narapidana politik, artinya sebelum vonis hukuman dijatuhkan. Kedua, disandang oleh seorang atau lebih hingga batas tak tertentu sampai ada putusan (politik) mengembalikan mereka ke masyarakat. (Krisnadi, 2001:3)

Menurut pemerintah Orde Baru waktu itu, jumlah Tapol yang tertangkap dan diamankan berjumlah lebih dari 500.000 jiwa. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Tapol golongan A dengan jumlah 1.967 jiwa, Tapol golongan B berjumlah 34.000 jiwa dan tapol golongan C berjumlah 580.000 jiwa. Sampai pada tahun 1975 untuk tapol golongan A 767 orang telah menjalani proses pengadilan sedangkan sisanya menunggu proses pengadilan. Untuk Tapol golongan C pemerintah mengklaim bahwa seluruhnya telah dibebaskan pada tahun 1977. Selain dari 3 golongan di atas, terdapat pula golongan F yaitu anggota-anggota PKI yang belum tertangkap dan pemerintah masih menganggap mereka dapat membahayakan Negara. (Krisnadi, 2001:23)

Tahanan politik 1965 diklasifikasikan menjadi beberapa golongan sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka pada peristiwa G 30 S, dikutip dari buku terbitan Mabes ABRI, bahaya laten Komunisme di Indonesia: pemberontakan G30SPKI dan penumpasannya. (Pusat sejarah dan tradisi ABRI 1994 71-72). golongan tersebut ialah Golongan A yang merupakan orang-orang yang dijadikan tahanan politik atas dasar bukti-bukti kuat untuk diajukan ke pengadilan. Sebagian besar didakwa terlibat langsung dengan peristiwa G 30 S dan sebagian besar diantaranya ialah pimpinan besar PKI.

Golongan B merupakan orang-orang yang ditahan karena diduga bersalah namun belum dapat dibuktikan kesalahannya. Oleh karena itu, Tapol golongan B ini belum bisa dibawa ke pengadilan. Tapol golongan B dianggap bersalah karena mereka adalah anggota dari organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI seperti anggota Lembaga Kebudayaan Rakjat (Lekra), Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Persatuan Guru Republik Indonesia Non-Vaksentral (PGRI-NV) dan lain-

lain. Golongan C merupakan orang-orang yang ditahan meskipun tidak memiliki bukti terlibat dalam peristiwa G 30 S. Mereka bukanlah anggota PKI ataupun anggota organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap terlibat dengan PKI.

Dalam penelitian ini terdapat 3 mantan Tapol yang akan menjadi informan penelitian, masing-masing mewakili tiap kategori Tapol yang pernah ditahan, ketiga mantan Tapol ini ialah: Anwar Salihin: merupakan mantan Tapol kategori A. Beliau ditangkap tahun 1966 dan dibebaskan tahun 1980. Beliau ditangkap karena menjadi bagian dari Pemuda Marhaen, salah satu organisasi pemuda yang dianggap berafiliasi dengan PNI. Oei Hiem Hwie (Pak Wik) merupakan Tapol kategori B. Beliau ditangkap tahun 1965 dan dibebaskan tahun 1978. Beliau adalah wartawan dari Terompet Masyarakat. Alimin adalah Tapol golongan C. beliau ditahan mulai tahun 1965 dan keluar tahun 1978. Pak Alimin berasal dari Tulungagung. Beliau ditahan atas tuduhan terlibat komplotan kiri di desa.

Pancasila secara umum dapat dipahami sebagai dasar Negara, ideologi bangsa dan sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Pembahasan tentang pancasila disini ialah pancasila secara umum sebagai dasar dan ideologi Negara, sejauh mana dan dari manakah pemahaman pancasila yang dimiliki oleh Tapol itu terbentuk.

Pak Wik yang bukan hanya mantan Tapol namun juga merupakan seorang Soekarnoisme menyatakan bahwa pengirisan dua ideologi ini merupakan metode dalam penciptaan Pancasila meskipun Pancasila sendiri digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Berikut ini pernyataan Pak Wik tentang terciptanya Pancasila:

“...Bung Karno itu adalah penggali Pancasila. Jadi apa yang dilakukan atau menjadi watak bangsa Indonesia itu oleh Bung Karno direnungkan, dipikirkan sampai lahirnya apa itu Pancasila. Pancasila itu adalah penggabungan dari Declaration of Independence nya Amerika dan Manifesto Komunis dari Karl Marx. Keduanya diiris, diambil yang baik-baik untuk melengkapi Pancasila...” (Wawancara: Senin, 19 September 2016)

Pak Wik memahami Pancasila sebagai Ideologi yang digali oleh Bung Karno berasal dari watak dan sifat dasar Bangsa Indonesia, ditambah dengan mengiris dua Ideologi besar waktu itu yaitu Komunisme dan Liberalisme.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Anwar yang mengatakan bahwa Pancasila adalah hasil dari pemikiran Bung Karno, hanya saja Pancasila yang dipahami dahulu lebih mendalam dan matang. Berikut ini pernyataan Pak Anwar:

“...Pancasila yang sekarang ini adalah Pancasila yang sudah jadi dengan melewati perjalanan yang panjang. Pancasila Soekarno sendiri tidak persis mirip dengan Pancasila yang sekarang ini. Dalam Pancasila Soekarno ada kebangsaan Indonesia itu di atas sendiri. Ada Internasionalisme nya juga. Bukan artinya Soekarno adalah pengikut ideologi transnasional namun Soekarno mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia berada pada tamansari Internasional. Lebih tepatnya internasionalisme perikemanusiaan, artinya perikemanusiaan secara universal...” (Wawancara: Minggu, 21 Agustus 2016)

Selain sebagai dasar Negara, pada masa setelah revolusi Pancasila juga dielu-elukan sebagai asas yang suci dan landasan dalam revolusi Indonesia. Pak Alimin selaku Tapol golongan C mengungkapkan pada masa itu nuansa penghayatan Pancasila sangat luar biasa. Berikut Pernyataan Pak Alimin:

“...ketika peristiwa itu meletus (G 30 S) semua orang jadi antusias membahas Pancasila sebagai dasar Negara. Ketika masa revolusi atau tahun-tahun sebelum itu kira-kira Pancasila lebih sering dibicarakan dan didiskusikan oleh kalangan atas, menteri, politikus, orang-orang partai, atau mahasiswa-mahasiswa. Ketika setelah peristiwa itu lah Pancasila sering dibicarakan dan disebut-sebut oleh semua kalangan masyarakat, ada yang bilang bahwa Pancasila mau diganti oleh Komunis, Pancasila harus dipertahankan sampai mati, Pancasila begini-begitu pokoknya jadi hal yang umum. Saya mendengar semua orang banyak yang membicarakan Pancasila waktu itu, namun saya tidak yakin mereka benar-benar mengerti dan memahaminya...” (Wawancara: Sabtu, 3 September 2016)

Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh ketiga Tapol di atas menunjukkan ada perbedaan pendapat dalam menanggapi asal-usul dan juga posisi Pancasila pada waktu itu. Ada yang menganggap bahwa perbincangan mengenai Pancasila adalah hal yang umum pada waktu itu namun ada juga yang menganggap bahwa Pancasila pada waktu itu hanya menjadi perbincangan kalangan atas dan pegiat politik saja. Tanggapan yang sedikit berbeda ini bisa dikarenakan karena antusiasme yang dimiliki masing-masing individu waktu itu. Antusiasme ini tergantung dari peran yang dimiliki individu waktu itu, ada individu yang memang dekat dengan dunia politik baik sebagai pelaku, simpatisan atau pengamat namun ada juga individu yang hidup sebagai rakyat biasa saja waktu itu. Hal ini mengakibatkan antusiasme untuk mempelajari Pancasila berbeda dan juga menghasilkan tanggapan yang beragam.

Penanaman terhadap masyarakat waktu itu juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh politik yang membawa ideologi masing-masing. Secara garis besar Pak Alimin menyebutkan ada golongan dari kaum agamis seperti orang-orang NU, Masyumi, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ada juga tokoh-tokoh yang membawa garis Nasionalis seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir dan lain sebagainya. Sedangkan garis Komunis sendiri dikatakan lebih dekat kearah Nasionalis. Hal ini karena ada sedikit kesamaan antara nilai-nilai yang dibawa garis Nasionalis dengan garis Komunis. Berikut sedikit pernyataan Pak Alimin tentang hal tersebut:

“...sejauh apa tokoh-tokoh ini menanamkan Pancasila yang pasti banyak pengikutnya ya, banyak yang mendengarkan. Secara umum ada yang dari orang-orang religius ada juga yang orang-orang abangan. Orang-orang abangan ini ya seperti kadang sholat kadang tidak, biasanya orang abangan ini sering dilekatkan dengan kelompok-kelompok nasionalis, marhaen. Padahal pada nyatanya ya tidak juga. Banyak orang-orang Komunis itu yang rajin ke langgar (musholla), yang nasionalis apa lagi, ada juga. Dan yang tidak sholat atau jarang ibadah pun juga belum tentu nasionalis atau marhaen, karena ada banyak yang seperti kejawan atau masih menyembah leluhur begitu. Jadi yang dibawakan oleh-tokoh-tokoh mereka ini, istilahnya apa ya, yang segaris begitu lah itu yang didengarkan...”

Pernyataan Pak Alimin memperjelas bahwa ada peran-peran-peran dari tokoh-tokoh politik yang membawa ideologinya masing-masing dalam menyampaikan Pancasila. Setiap tokoh membawa ideologinya masing-masing dan berpengaruh terhadap massa mereka yang banyak dan mengikuti pemikiran tokoh yang mereka ikuti.

Peran Tapol pada masa sebelum gerakan 30 September 1965 pada nantinya akan mempengaruhi pemikiran dan anggapan Tapol terhadap Pancasila. Hal ini karena tidak semua orang yang dijadikan Tapol adalah orang-orang politik, Soekarno, aktivis dan peran-peran yang dekat dengan dunia politik dan kenegaraan yang membuat mereka mempelajari ideologi. Banyak diantara Tapol yang merupakan rakyat biasa bahkan rakyat jelata yang tidak tahu-menahu dan jauh dari terlibat. Peran yang berbeda-beda inilah yang membuat mereka mempelajari dan mengerti Pancasila dari hal-hal yang berbeda-beda. Ada yang mengikuti pidato dan tulisan Soekarno, ada yang terlibat diskusi-diskusi dan juga ada yang memperdalam Pancasila sejak di dalam Tahanan.

Pengalaman Pak Wik menunjukkan bahwa penanaman Pancasila pada masanya dilakukan melalui media-media yang cukup bisa terjangkau bagi pembelajarnya. Melalui radio-radio dan media tulisan,

penyebaran pemikiran Bung Karno dengan mudah menyebar. Hal yang demikian ini cukup mudah untuk dijangkau, akan tetapi penyebaran ajaran Pancasila juga tidak bisa menyentuh rakyat seluruhnya. Bagi masyarakat desa yang hidup sebagai rakyat biasa, media Koran dan radio cukup baik sebagai pengantar informasi. Namun hal tersebut tidak begitu intens masuk ke wilayah mereka. Hal ini karena masyarakat sendiri yang memang tidak bisa memiliki akses untuk menerima ajaran Pancasila, serta peran masyarakat yang berbeda-beda dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini Pak Alimin memberikan pernyataan sebagai berikut:

“...Koran dan radio itu bisa masuk desa. Kalau radio mungkin hanya beberapa orang saja yang punya atau kantor desa atau kantor kelurahan saja yang punya. Kalau Koran bisa dibaca setiap hari sama siapa saja, terutama kalau ada kabar besar atau penting. Saya belajar Pancasila lebih banyak dengan orang-orang. Banyak teman-teman saya yang orang partai, mereka sering bicara ini itu, politik pokoknya banyak. Saya tertarik dengan hal-hal tersebut makanya saya berteman dengan mereka. Tindakan-tindakan orang-orang BTI juga sering menggunakan senjata keadilan sosial. Dengan itu kadang mereka mematok-matok tanah yang luas milik tuan tanah. Saya lebih sering mendengar dari orang-orang tentang Pancasila ini. Radio tidak setiap saat bisa diputar dan di Koran juga tidak setiap hari memberitakan Pancasila...”
(Wawancara: Sabtu, 3 September 2016)

Dari pernyataan Pak Alimin di atas dapat ditangkap bahwa akses yang tidak dimiliki semua orang membuat setiap orang memiliki sumber yang berbeda-beda juga dalam mempelajari Pancasila. Pak Alimin mendapat pelajaran tentang Pancasila melalui teman-temannya dan beberapa bacaan di Koran. Peran yang dilakoni Pak Alimin sebagai petani biasa juga tentu saja tidak memberikan akses lebih pada dirinya untuk mendapat, membaca ataupun mendengar kursus-kursus Pancasila dari Bung Karno.

Berbeda halnya dengan Pa Alimin, Pak Anwar cukup memiliki akses dalam mendapat pelajaran tentang Pancasila. Latar belakangnya yang merupakan Pemuda Marhaen, yang merupakan organisasi pemuda yang sering disebut berafiliasi dengan PNI membuat beliau memiliki banyak media dalam mempelajari Pancasila. Berikut pernyataan Pak Anwar:

“...Radio, Koran dan buku, itu yang menjadi alat saya dalam mempelajari Pancasila. Di dalam pemuda marhaen sendiri banyak juga yang menjadi wartawan pada waktu itu. Mereka yang biasanya membawa buku bacaan untuk teman-teman lainnya di dalam pemuda marhaen itu sendiri. Karena buku yang dibawa tidak begitu banyak jumlahnya jadi biasanya buku itu digilir, dibuat gantian. Pada waktu itu belum ada mesin fotocopy seperti

sekarang, jadi tidak mungkin buku digandakan. Banyak bacaan yang saya baca waktu itu, mulai dari tulisan-tulisan Bung Karno, buku-buku yang memuat pidatonya, ada juga di bawah bendera revolusi yang dilarang pada masa Orde Baru, penyambung lidah rakyat dan lain-lain. Setelah dibaca biasanya kita diskusikan isinya...”
(Wawancara: Minggu, 21 Agustus 2016)

Pemahaman mantan Tapol terhadap Pancasila sangat dipengaruhi oleh darimana sumber yang didapat, sejauh mana jangkauan untuk mendapatkan informasi dll. Pancasila telah disepakati sebagai dasar Negara republik Indonesia, meskipun begitu perjalanan Pancasila tidak lepas dari pasang-surut, melewati beberapa pemberontakan dan kejadian besar dalam sejarah, serta melewati masa-masa pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila pada Orde Baru. Pancasila hari ini ditanggapi tidak begitu berbeda oleh mantan-mantan Tapol. Mereka sepakat bahwa Pancasila adalah dasar Negara yang tidak bisa diubah-ubah. Pancasila melewati perjalanan panjang sebagai landasan hidup bangsa dan oleh karenanya harus tetap dipertahankan. Meskipun begitu mantan Tapol ini juga tidak mengelakkan adanya pergeseran pemahaman Pancasila pada masa dahulu dan sekarang.

Pak Anwar sempat menekankan bahwa pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh dan juga banyak terjadi di Indonesia waktu itu sebenarnya juga tidak serta-merta mau mengusir kedudukan Pancasila, karena Pancasila adalah kesadaran bersama yang diyakini sebagai dasar Negara. Berikut kutipan pernyataan Pak Anwar:

“...Pancasila itu panduan hidup bangsa. Yang digali oleh Bung Karno, disempurnakan dengan gagasan para tokoh-tokoh lainnya. Semua orang memahami pada waktu itu, kita semua bangga punya Pancasila. Walaupun waktu itu adalah masih panas karena setelah revolusi semangat justru membara, namun keyakinan Pancasila sebagai dasar Negara tidak pernah terhapuskan. Jadi tidak ada itu waktu itu orang yang berani terang-terangan ngomong di depan umum bahwa Pancasila adalah sistem yang tidak baik. Semua sadar bahwa apa yang dirumuskan dan menjadi alat perjuangan harus dipertahankan. Kalaupun, ada pemberontakan-pemberontakan pada waktu itu saya merasa itu tidak untuk mengganti Pancasila. Bahwa memang ada ketidakpuasan terhadap Orde Lama punya Bung Karno itu memang, bahwa Bung Karno tidak cocok dengan beberapa politikus itu benar, bahwa ada konflik kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain itu benar, tapi tujuannya tidak serta-merta mengganti Pancasila. Peristiwa madiun itu, yang katanya orang-orang adalah PKI itu pada itu hanya disebut sebagai peristiwa madiun, tidak ada PKI nya...”
(Wawancara: Minggu, 21 Agustus 2016)

Pernyataan di atas menegaskan bahwa pada waktu itu banyak orang yang memahami secara sadar bahwa Pancasila adalah dasar Negara. Sulit menggantikan posisi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain. Pak Anwar juga menyebut bahwa masa pendukung Soekarno sangatlah banyak pada masa itu, atau lebih tepatnya dibuktikan dengan kemenangan PNI pada pemilu 1955 sehingga penentang Pancasila tidak begitu terlihat muncul di permukaan. Kesadaran bersama ini menjadi dasar dari sikap nasionalisme yang berkembang dan tertanam kuat waktu itu. Kesadaran memahami Pancasila sebagai dasar Negara dan terwujud menjadi sikap nasionalisme dimiliki oleh semua orang.

Pemahaman Pancasila sebagai dasar Negara telah diungkapkan oleh informan sebelumnya. Hal tersebut adalah eksternalisasi yang terjadi setelah melewati berbagai masa dalam perjalanan hidup mereka. Dalam melewati berbagai fase hidup tentunya terdapat beberapa hal yang membuat terjadinya dialektika dalam diri Tapol, salah satunya tentang Pancasila. Bagaimanakah proses dialektis ini berlangsung dalam diri Tapol akan dibahas pada subbab ini. Dilihat dari pernyataan yang sudah dihimpun, sekilas pernyataan Tapol terhadap Pancasila tidak lah berbeda dari pendapat orang pada umumnya. Pernyataan seperti Pancasila adalah dasar Negara, ideologi dll adalah hal yang umum, namun beberapa poin seperti Pancasila yang melahirkan rasa nasionalisme dalam diri rakyat pada waktu itu atau kuatnya Pancasila sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkannya, walaupun terjadi pemberontakan namun hal itu adalah pemberontakan terhadap pemerintah, didasari oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah dan bukan Pancasila, adalah hal-hal yang tidak umum terjadi pada masa setelahnya (Orde Baru dan reformasi). Dapat diketahui bahwa pada masa Orde Baru Pancasila adalah asas tunggal dalam berorganisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Orde Baru tidak menghendaki asas lain dalam organisasi selain Pancasila. Pada masa Orde Lama dimana para Tapol masih hidup di luar tahanan justru ada ide Nasakom (nasionalis, agamis, Komunis) yang dicetuskan oleh Bung Karno. Hal ini bertolak belakang dengan Orde Baru yang memberangus paham Komunis dan menyederhanakan polarisasi partai politik dengan berbagai latar ideologi hanya menjadi tiga partai politik.

Beberapa perbedaan poin dari bagaimana cara Orde Baru dan Orde Lama menjalankan, memahami dan menanamkan Pancasila inilah yang diungkapkan Tapol sebagai proses obyektivasi dalam dirinya. Secara sekilas tidak ada hal yang secara prinsipil benar-benar berbeda dari Orde Lama dan Orde Baru dalam mengamalkan Pancasila, beberapa poin yang berbeda saja yang dianggap tidak ada dalam dua orde yang berlainan ini. Secara umum Tapol merasakan perbedaan tersebut namun

tidak mengetahui hal apa yang secara teknis membuat Pancasila dari masa ke masa mengalami perubahan. Beberapa yang dapat disebutkan adalah penataran program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Program ini adalah program dari pemerintahan Orde Baru yang dicetuskan oleh presiden Soeharto karena menganggap penghayatan masyarakat terhadap Pancasila sangatlah rendah. Sehingga program ini dimasukkan ke dalam materi sekolah-sekolah, dari mulai SD sampai SMA. Tidak hanya itu, seluruh lapisan masyarakat juga merasakannya tidak terkecuali Tapol itu sendiri. Di dalam tahanan terutama tahanan yang besar seperti pulau Buru yang memang diciptakan sebagai proyek instalasi rehabilitasi maka Tapol mendapat pendidikan ulang mengenai Pancasila. Beberapa hal yang masih diingat adalah tentang wajibnya menghafal Pancasila dan beberapa lagu nasional.

Program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila adalah program yang diciptakan untuk menanamkan nilai Pancasila lebih mendalam untuk menciptakan manusia yang "Pancasilais". Beberapa alasan diciptakannya program ini diantaranya terdiri dari alasan filosofis, alasan historis, alasan yuridis konstitusional dan alasan pedagogis- psikologis. (Darmodihardjo, 1984: 122-124). Alasan filosofis antara lain karena suatu bangsa harus memiliki suatu pandangan hidup yang secara nasional diakui benar dan sah, karena apabila tidak demikian, maka bangsa tersebut akan terpecah-pecah menjadi sejumlah golongan sesuai dengan jumlah pandangan hidup yang timbul di Negara itu. Alasan filosofis tersebut menyiratkan makna penyeragaman. Sesuatu yang terlalu majemuk bagi pemerintah Orde Baru dianggap tidak baik dan membahayakan. Sehingga supaya tidak terpecah-pecah maka perlu ada aturan mengenai pandangan hidup yang sah yang diatur pemerintah. Hal inilah yang membuat Orde Baru membuat suatu pandangan hidup untuk dihayati oleh rakyatnya. Suatu pandangan hidup bisa dimengerti dan dipahami dengan jelas jika dijabarkan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pendukung-pendukungnya. Dengan demikian diharapkan pandangan hidup yang memiliki nilai luhur tersebut dapat hidup dalam diri masyarakat dan menciptakan masyarakat yang Pancasilais

Menurut Pak Anwar, beliau beranggapan justru pada masa Orde Baru lah Pancasila dianggap hanya sebagai slogan. Beliau mengatakan bahwa pemberontakan-pemberontakan di masa lalu pada dasarnya adalah atas ketidakpuasan terhadap pemerintah, bukan atas dasar ingin mengganti Pancasila. Berikut pernyataan Pak Anwar:

"...Pemberontakan itu biasa, namanya juga masa revolusi. Akan tetapi tidak ada yang mencoba

mengganti Pancasila. Pemberontakan untuk mendirikan Negara Islam memang ada, tapi apakah pengganti Pancasila sudah disiapkan mereka? Kekuatan rakyat yang dipimpin Bung Karno amatlah besar, Pancasila tidak akan dengan mudah dijatuhkan. Walaupun tanpa P4 P4an seperti Orde Baru, tapi rakyat menjiwai Pancasila itu kuat sekali. Nahh Orde Baru ini kan ke pedean saja, mereka merasa mengerti Pancasila sehingga membuat badan untuk P4 itu. Mereka menganggap masyarakat perlu diajar Pancasila dengan cara begitu. Rakyat ya nerima saja wong Soeharto itu kuat. Baru setelah mereka jatuh, reformasi lahir, kita bisa ketawakan, pemerintah yang dulu mengajarkan Pancasila kepada rakyat ternyata perilakunya tidak se-Pancasila yang diajarkan. Banyak dosa yang ditinggalkan, banyak kesengsaraan yang dirasakan...” (Wawancara: Sabtu, 10 September 2016)

Pernyataan Pak Anwar menunjukkan ketidaksepakatan terhadap program indoktrinasi Pancasila yang dilaksanakan oleh Orde Baru. Pak Anwar merasa bahwa program P4 justru hanya membuat Pancasila sebagai slogan saja, karena pemimpin yang mengajarkan P4 sendiri tidak mengamalkan dan menghayati Pancasila. Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Wik, beliau mengatakan Pancasila kini semakin dipersempit ruang dan maknanya. Pak Wik merasakan hal tersebut saat ini dan ketika ditanya tentang program P4 di masa Orde Baru Pak Wik menyebut bahwa hal tersebut memang dimulai semenjak masa Orde Baru. Berikut ini pernyataan Pak Wik:

“...Pancasila sekarang itu semakin sempit maknanya, dipersempit mungkin saya juga tidak tahu. P4 itu juga bisa jadi salah satunya mungkin. Dulu di pulau Buru itu juga sempat ada penataran seperti itu, tapi bukan P4 itu. Kami tidak tahu itu yang menatar itu siapa orangnya, darimana asal usulnya tiba-tiba menatar saja, mengajari kami Pancasila. Disuruh menghafal apa lah banyak pokonya. Banyak teman-teman yang tidak nurut, tidak mau ikutin perintah, kami merasa direndahkan jika harus ikut perintah. Baru setelah keluar ada program itu, anak kecil-kecil sampai anak sekolah yang sudah besar itu menghafal pancasila itu begini-begini, tidak boleh boros, tidak boleh mengejek teman, terus tidak boleh hidup mewah, banyak lah itu. Saya tertawa saja, Pancasila kok sesempit itu, ditambah lagi ternyata pemerintahnya, birokrasinya hidup mewah, boros, korupsi. Sebegitunya Orde Baru mempertahankan kekuasaan, sampai menciptakan, merekayasa semuanya...” (Wawancara: Senin, 26 September 2016)

Pak Wik mengungkapkan hal-hal umum yang ada di poin-poin P4 adalah hal yang sudah umum. Maka dari itu tidak bisa hal yang umum ini menjadi jiwa bagi

sebuah bangsa. Pancasila harusnya lebih mendalam dan tidak dibatasi oleh poin-poin tindakan seperti yang dirancang Orde Baru.

Pak Alimin selaku mantan Tapol dari golongan C memiliki pandangan yang tidak begitu berbeda dari dua informan sebelumnya mengenai Pancasila dari masa ke masa ini. Pak Alimin menjawab bahwa antusiasme masyarakat terhadap Pancasila tidak semeriah pada saat masa revolusi. Pancasila terkesan lebih sebagai symbol saja tanpa ada penghayatan yang lebih. Begitupun ketika berpendapat tentang P4, beliau mengatakan bahwa program tersebut tidak bisa membuat masyarakat kembali menghayati Pancasila seperti masa setelah revolusi. Berikut pernyataan Pak Alimin:

“...Saya bukan orang elit, bukan politisi, bukan orang yang suka demo pada waktu itu. Hanya saja saya tahu bahwa antusiasme orang-orang itu pada masa revolusi sangat meriah. Ketertarikan terhadap omong-omongan tentang Negara itu sangat ramai sekali. Lha kalau sekarang ini sepi. Orang seperti tidak tahu dan peduli kepada bangsa dan Negara. Entah mungkin saya yang sudah tidak ikut perkembangan jaman atau bagaimana, tapi yang saya rasakan ya begitu, sepi. Kalau untuk masalah P4 itu saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya ada program tentang Pancasila, tidak tahu itu penanaman, pembelajaran atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi saya tidak merasakan hasilnya. Malah orang-orang ini sepi...” (Wawancara: Sabtu, 24 September 2016)

Pak Alimin mempertegas bahwa pemahaman terhadap Pancasila pada masyarakat antara dahulu dengan sekarang adalah berbeda. Hal ini diamati Pak alimin dari antusiasme masyarakat terhadap masalah kebangsaan. Pak Alimin megetahui bahwa ada program penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru. Hanya saja hal tersebut tidak membawa dampak yang signifikan dalam membuat orang memahami Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman Pak Alimin dan tujuan pemerintah Orde Baru cukuplah berbeda. Pak Alimin mengamati bahwa masyarakat yang antusias dan aktif dalam membicarakan Pancasila adalah masyarakat yang umum pada masanya. Hal ini menjadi nilai yang terintenasiasi dalam dirinya. Sementara tujuan Orde Baru dalam menciptakan P4 adalah dengan tujuan penyeragaman penghayatan Pancasila. Hal inilah yang berbeda dari pemahaman Pak Alimin di awal bahwa manusia yang memahami Pancasila adalah yang memiliki antusiasme dan kritis terhadap masalah kebangsaan, sementara Orde Baru justru menciptakan penanaman Pancasila sebagai media untuk menyeragamkan manusia dan membuat rakyat tidak begitu kritis di bawah pemerintahan yang sangat kuat.

Konstruksi Mantan Tahanan politik 1965 di Surabaya terhadap Pancasila

Fase Internalisasi

Pemahaman dan informasi tentang Pancasila diperoleh Tapol dari berbagai macam media tergantung dari jangkauan informasi yang bisa mereka dapatkan. Ada yang mendapatkan dari Koran dan radio saja, karena pada waktu itu yang memiliki radio tidak semua orang sehingga pidato Bung Karno yang disiarkan dari radio disebarluaskan melalui corong pengeras suara. Terdapat juga yang mendapat pengetahuan tentang Pancasila dari buku-buku kuliah Pancasila yang diberikan Bung Karno, selain Koran dan juga radio. Terdapat juga yang mendapat melalui media-media tersebut lalu dikembangkan dengan diskusi dengan rekan organisasi.

Fase Obyektivasi

Tapol mengalami fase obyektivasi melalui proses dialektika dari pertemuan nilai yang berbeda dari apa yang mereka dapatkan saat proses internalisasi. Fase ini secara umum berada pada masa saat mereka ditahan dan masa setelah mereka lepas dari tahanan yaitu masa orde baru. Secara umum mereka menganggap bahwa Pancasila mengalami penyempitan makna namun tidak dapat dipastikan apa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satu yang dapat diingat adalah Program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dianggap membuat Pancasila sebagai pedoman tekstual tertulis dan justru menyempitkan makna Pancasila karena bukan sebagai konsep hidup namun panduan hidup tertulis saja.

Fase Eksternalisasi

Tapol memiliki pandangan yang tetap soal Pancasila yaitu sebagai dasar Negara yang harus dijaga dan dipertahankan, Pancasila juga adalah ideology yang digali oleh Bung Karno dari sifat dan watak asli bangsa Indonesia. Ditambah dengan mengiris dua ideology besar pada waktu itu yaitu liberalisme dan komunisme. Sehingga Pancasila dianggap sebagai ideology yang lengkap dan cocok bagi bangsa Indonesia. Pemahaman ini menunjukkan kecenderungan lebih dominannya nilai yang ditanamkan pada masa internalisasi karena ungkapan yang diungkapkan tidak jauh beda dengan apa yang mereka dapatkan pada masa internalisasi. Dapat disimpulkan bahwa indoktrinasi pada masa internalisasi sangat kuat sehingga menjadi nilai yang lebih dominan pada diri mereka dan tidak berubah banyak hingga saat ini.

Konstruksi Pancasila Menurut Mantan Tahanan Politik 1965 di Surabaya

1. Pancasila dipahami sebagai dasar Negara, ideology yang digali dari sifat dan watak bangsa Indonesia, dilengkapi dengan irisan dari dua ideologi besar dunia waktu itu yakni liberalisme dan komunisme.
2. Tapol mendapat pengetahuan tentang Pancasila dari berbagai media seperti Koran, radio, buku dan diskusi.
3. Tapol menganggap bahwa Pancasila mengalami perubahan disbanding dahulu, Pancasila dianggap lebih sempit daripada yang seharusnya, yaitu menjadi konsep hidup.

Dari bagan di samping dapat dipahami bahwa Tahanan Politik atau Tapol telah melewati tiga tahap sesuai dengan fase-fase yang ada dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yaitu fase internalisasi, obyektivasi dan eksternalisasi. Secara umum fase internalisasi adalah Pemahaman dan informasi tentang Pancasila diperoleh Tapol dari berbagai macam media tergantung dari jangkauan informasi yang bisa mereka dapatkan. Ada yang mendapatkan dari Koran dan radio saja, karena pada waktu itu yang memiliki radio tidak semua orang sehingga pidato Bung Karno yang disiarkan dari radio disebarluaskan melalui corong pengeras suara. Terdapat juga yang mendapat pengetahuan tentang Pancasila dari buku-buku kuliah Pancasila yang diberikan Bung Karno, selain Koran dan juga radio. Terdapat juga yang mendapat melalui media-media tersebut lalu dikembangkan dengan diskusi dengan rekan organisasi.

Fase selanjutnya dapat dirangkum bahwa usaha yang dilakukan pemerintahan Orde Baru menjadi sebuah fase dialektis bagi para mantan Tapol. Program seperti P4 yang ditujukan Orde Baru untuk menanamkan Pancasila dianggap justru menyempitkan makna Pancasila itu sendiri, sehingga kini Pancasila mengalami pergeseran namun sebab utama pergeseran tersebut tidak bisa diungkapkan secara detail, program P4 hanyalah salah satu contoh yang dapat dijelaskan saja karena pelaksanaan yang begitu massive pada masa Orde Baru. Hal-hal seperti antusiasme masyarakat dan rasa nasionalisme tidak dapat lagi ditemukan pada diri masyarakat. Hal ini membuat makna Pancasila dianggap sedikit berbeda dari yang mereka pahami. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa penanaman atau indoktrinasi Pancasila pada masa revolusi hingga Orde Lama terbukti lebih kuat dari pada masa Orde Baru. Terbukti dari nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan Orde Lama lebih diresapi dan dihayati, sehingga menjadi sesuatu yang lebih dominan dalam diri.

Pada fase eksternalisasi Tapol memiliki pandangan yang tetap soal Pancasila yaitu sebagai dasar Negara yang harus dijaga dan dipertahankan, Pancasila juga adalah ideology yang digali oleh Bung Karno dari sifat dan watak asli bangsa Indonesia. Ditambah dengan mengiris dua ideology besar pada waktu itu yaitu liberalisme dan komunisme. Sehingga Pancasila dianggap sebagai ideology yang lengkap dan cocok bagi bangsa Indonesia. Pemahaman ini menunjukkan kecenderungan lebih dominannya nilai yang ditanamkan pada masa internalisasi karena ungkapan yang diungkapkan tidak jauh beda dengan apa yang mereka dapatkan pada masa internalisasi. Dapat disimpulkan bahwa indoktrinasi pada masa internalisasi sangat kuat sehingga menjadi nilai yang lebih dominan pada diri mereka dan tidak berubah banyak hingga saat ini.

Bagan 1. Hasil Penelitian Konstruksi mantan Tahanan Politik 1965 di Surabaya terhadap Pancasila

Pembahasan

Mantan tahanan politik 1965 adalah masyarakat subyektif yang memandang Pancasila sebagai realitas obyektif. Dalam fase internalisasi ini mantan tahanan politik menerima Pancasila sebagai pengetahuan yang disosialisasikan. Mantan Tapol ini menerima sosialisasi pengetahuan tentang Pancasila melalui berbagai media tergantung dari jangkauan mereka terhadap media tersebut dan juga peran sosial yang mereka lakoni pada masa tersebut. Beberapa media yang umum adalah seperti Koran, artikel selebaran, pidato di radio, buku-buku dan diskusi. Media-media ini tergantung oleh peran dari Tapol untuk menjangkaunya, ada informan yang hanya memperoleh pengetahuan tentang Pancasila melalui Koran dan artikel saja karena beliau adalah anak petani pada masanya, peran sosial tersebut membuat beliau tidak bisa menjangkau media yang lebih luas untuk memahami Pancasila. Informan lain ada juga yang memperoleh pengetahuan tentang Pancasila melalui buku-buku, pidato Bung Karno di radio dan juga diskusi-diskusi. Hal ini tidak lain karena peran mereka yang sebagai organisatoris dan pewarta berita pada masanya, hal ini mengungkap bahwa peran sosial berpengaruh terhadap jangkauan informasi yang bisa didapat.

Jangkauan informasi yang berbeda-beda ini tidak membuat proses internalisasi atau bisa juga disebut indoktrinasi Pancasila terhambat satu dengan yang lain. Jangkauan informasi ini hanya berimplikasi terhadap pengetahuan terhadap Pancasila secara mendetail namun tidak kepada keyakinan bahwa Pancasila adalah dasar Negara yang harus dijunjung dan dipertahankan. Hal ini dapat ditangkap dari pernyataan bahwa tidak semua orang memahami benar Pancasila namun semua orang membicarakan dan meyakini sebagai dasar Negara.

Peran tokoh dan figur politik pada waktu itu juga berpengaruh dalam menanamkan Pancasila kepada masyarakat yang dimana Tapol menjadi bagian di antaranya. Tidak semua orang yang mendukung atau simpatisan dari partai adalah massa ideologis, ada juga yang hanya mengikuti tokoh atau figur yang junjungnya. Hal ini yang membuat penanaman Pancasila pada masa itu menjadi lebih sukses, karena tokoh-tokoh yang menjunjung Pancasila akan otomatis diikuti oleh massanya yang banyak, ada yang kemudian mempelajari lebih lanjut ada juga yang mengikuti saja, namun keyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar Negara sangat kuat pada waktu itu hingga melahirkan sikap nasionalisme.

Pancasila pada fase internalisasi ini dipahami Tapol sebagai konsep, sehingga setiap orang bisa menerjemahkan sendiri sikap yang diambilnya sebagai cerminan dari ke-Pancasilaannya. Pada fase ini juga penerjemahan Pancasila tidak kaku dan membatasi seperti

pada masa setelahnya (Orde Baru). Pada masa ini hidup semboyan Nasakom yang diutarakan Bung Karno. Tidak ada masalah yang besar atas hal itu, walaupun ada unsur Komunis di dalamnya namun penanaman Pancasila pada masa ini mengajarkan kebebasan mempelajari sesuatu ideologi lain namun tanpa meninggalkan Pancasila. Hal ini karena Pancasila diyakini sebagai penggalian dari sifat asli atau watak bangsa Indonesia namun dicetuskan dengan metode mengiris dua ideologi besar pada waktu itu, yaitu liberalisme dan Komunisme.

Dalam fase obyektivasi ini mantan Tapol mengalami interaksi dengan dunia intersubyektifnya. Interaksi ini bisa berupa bertemu hal baru yang mendukung pengetahuan atas proses internalisasi namun juga bisa berupa sesuatu yang kontraposisi dengan apa yang sudah dipahami oleh mantan Tapol. Secara garis besar fase ini berada pada masa penahanan Tapol dan masa setelah Tapol bebas dalam kurun waktu pemerintahan Orde Baru. Masa ini Tapol menemui dan berinteraksi dengan hal-hal yang walaupun tidak secara kontradiktif berbeda dari yang Tapol terima pada masa revolusi dan Orde Lama namun juga tidak bisa dengan mudah diterima oleh Tapol. Program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat P4 pada masa Orde Baru menjadi salah satu hal yang disoroti oleh Tapol. Program ini secara tidak langsung dianggap sebagai penyempitan makna Pancasila menjadi sesuatu yang tidak lagi kontekstual namun tekstual saja.

Proses interaksi yang umumnya terjadi pada masa Orde Baru ini menjadi sebuah proses dialektis pada diri Tapol. Hal ini akan berjalan terus menerus jika sesuatu yang menjadi antitesis dari pengetahuan Tapol pada masa internalisasi dianggap sebagai sesuatu yang seimbang dan diterima sebagai nilai baru. Interaksi yang terjadi bergantung pada nilai yang dominan yang diyakini individu sebagai suatu nilai kebenaran. Hal ini merujuk kepada hal apakah yang akan terjadi jika suatu nilai menjadi lebih kuat karena mengakar dalam dan sangat diyakini serta dipahami sebagai nilai yang lebih benar daripada nilai baru yang ditemuinya. Dalam fase ini proses interaksi Tapol dengan nilai baru yang berupa penanaman Pancasila melalui program P4 rancangan Orde Baru dianggap tidak lebih dominan dari nilai yang mereka dapatkan pada masa internalisasi.

Hal-hal yang tertanam pada diri Tapol pada fase internalisasi atau yang terjadi pada masa revolusi hingga Orde Lama telah mengakar kuat pada diri Tapol. Sehingga program penanaman yang diberikan Orde Baru tidak bisa merubah apa yang sudah diyakini. Hal-hal yang didapat seputar Pancasila pada masa internalisasi adalah seperti antusiasme terhadap Pancasila dan isu kebangsaan dan kenegaraan ataupun lahirnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat besar. Hal-hal tersebutlah yang

tidak ada pada masa obyektivasi yang berada pada era Orde Baru. Program P4 yang menjadi panduan dalam memahami Pancasila dianggap justru menyempitkan makna Pancasila itu sendiri, karena program tersebut mengatur tingkah laku warga Negara menuju warga yang Pancasila. Sementara itu Tapol memiliki pemikiran bahwa justru Pancasila itu membuat seseorang bebas bisa membicarakan dan berpartisipasi terhadap masalah kebangsaan, menunjukkan kepedulian dengan kritik yang membangun dan juga tidak tertutup untuk mempelajari ideologi besar seperti pada masa Orde Lama.

Proses dialektika ini menunjukkan bahwa ada nilai dominan yang hidup dalam diri Tapol, yaitu nilai yang tertanam pada masa internalisasi lebih kuat daripada nilai-nilai yang menjadi hal baru dalam interaksi dalam masa obyektivasi. Penanaman Pancasila secara tekstual dianggap justru menyempitkan Pancasila dan membuat Pancasila berlaku hanya sebagai teknis berkelakuan dan bukannya sebagai konsep hidup. Dapat disimpulkan dalam fase ini bahwa Tapol lebih meyakini apa yang mereka peroleh pada masa internalisasi daripada apa yang mereka temui pada masa obyektivasi.

Dalam fase Internalisasi ini pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh mantan Tapol telah menjelma menjadi sebuah pandangan atau identitas diri dalam memaknai realitas obyektifnya, dalam hal ini adalah Pancasila. Fase ini telah melahirkan sebuah pandangan yang menjadi pandangan subyektif melalui pengalaman-pengalaman serta dialektika-dialektika dalam dirinya. Secara personal mantan Tapol mengungkapkan pemikirannya terhadap Pancasila, namun pemikiran tersebut secara umum dan sekilas tidak begitu berbeda dari pandangan pada umumnya. Pancasila dianggap sebagai dasar Negara, sebuah ideologi yang lahir karena digali oleh Bung Karno berdasar watak dan sifat asli manusia Indonesia, kemudian dilengkapi dengan mengiris dua ideologi besar dunia yaitu liberalisme dan Komunisme.

Pancasila diyakini adalah sesuatu yang kuat yang hidup dalam diri masyarakat Indonesia dan tidak akan mudah digoyahkan ataupun diganti dengan ideologi lainnya. Mantan Tapol masih meyakini bahwa Pancasila bukanlah terbatas pada panduan tekstual dalam menerapkannya, namun Pancasila adalah berupa konsep hidup. Sehingga manusia Indonesia yang memahaminya adalah bebas menentukan sikap atas sesuatu yang terjadi dan bukannya dibatasi dengan panduan tekstual tentang hidup ber-Pancasila yang ideal dan benar. Tapol beranggapan bahwa Pancasila hari ini semakin menyempit ruangnya, tidak dapat diterjemahkan dengan pasti apa yang membuat Pancasila menjadi semakin menyempit dan tidak semeriah dulu dalam orang-orang memahaminya. Antusiasme masyarakat terhadap Pancasila atau hal-hal kebangsaan lainnya dianggap Tapol

sebagai salah satu cerminan masyarakat yang masih menjunjung Pancasila, sementara masyarakat yang apatis ditanggapi sebagai masyarakat yang telah terdampak menyempitnya ruang Pancasila dalam hadir di kehidupan sehari-hari.

Penanaman program P4 dalam diri masyarakat Indonesia adalah satu hal yang dianggap Tapol sebagai sesuatu yang menjadi faktor berubahnya masyarakat dalam memaknai Pancasila. Hal-hal tekstual seperti tidak mencuri, tidak boros, saling tolong menolong dan saling mencintai sesama manusia dianggap Tapol sebagai hal yang umum dan tidak perlu di panduan maka manusia pasti mengerti nilai-nilai tersebut sebagai nilai yang baik untuk dikerjakan. Pancasila sebagai ideologi dipahami Tapol sebagai hal yang lebih luas, yaitu konsep hidup yang dinamis yang tidak tekstual. Penyempitan makna Pancasila ini dirasakan Tapol masih hidup sampai sekarang, walau begitu Tapol tetap berkeyakinan bahwa Pancasila yang merupakan watak dan sifat asli bangsa Indonesia tidak akan hilang dari orang Indonesia itu sendiri.

PENUTUP

Simpulan

Konstruksi mantan tahanan politik 1965 di Surabaya terhadap Pancasila terjadi melalui tiga fase, yaitu internalisasi, obyektivasi dan eksternalisasi. Internalisasi dimulai ketika para mantan Tapol memperoleh informasi dan pengetahuan tentang Pancasila. Informasi dan pengetahuan seputar Pancasila ini diperoleh melalui berbagai macam cara tergantung dari jangkauan mereka terhadap media tersebut dan juga peran sosial yang mereka *lakoni* pada masa tersebut. Beberapa media yang umum adalah seperti koran, artikel selebaran, pidato di radio, buku-buku dan diskusi. Media-media ini tergantung oleh peran yang dijalani Tapol untuk menjangkaunya, ada informan yang hanya memperoleh pengetahuan tentang Pancasila melalui koran dan artikel saja karena beliau adalah anak petani pada masanya, peran sosial tersebut membuat beliau tidak bisa menjangkau media yang lebih luas untuk memahami Pancasila. Informan lain ada juga yang memperoleh pengetahuan tentang Pancasila melalui buku-buku, pidato Bung Karno di radio dan juga diskusi-diskusi. Hal ini tidak lain karena peran mereka yang sebagai organisatoris dan pewarta berita pada masanya, hal ini mengungkap bahwa peran sosial berpengaruh terhadap jangkauan informasi yang bisa didapat.

Proses obyektivasi atau dialektika yang terjadi dalam diri Tapol pada umumnya terjadi ketika Tapol berada pada masa penahanan dan masa setelah Tapol bebas dalam kurun waktu pemerintahan Orde Baru. Pada masa tersebut Tapol menemui dan berinteraksi dengan hal-hal

yang walaupun tidak secara kontradiktif berbeda dari yang Tapol terima pada masa revolusi dan Orde Lama namun juga tidak bisa dengan mudah diterima oleh Tapol. Program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat P4 pada masa Orde Baru menjadi salah satu hal yang disoroti oleh Tapol. Program ini secara tidak langsung dianggap sebagai penyempitan makna Pancasila menjadi sesuatu yang tidak lagi kontekstual namun tekstual saja.

Dalam fase obyektivasi ini akan terjadi proses bertemunya nilai lama dengan nilai baru, akan ada proses saling mempengaruhi antara nilai lama dan nilai baru dan akan menciptakan suatu nilai baru sebagai hasil eksternalisasi, akan tetapi pandangan subyektif seseorang akan tetap bertahan pada salah satu nilai jika salah satu nilai tersebut dominan daripada yang lain. Dalam hal ini penanaman nilai atau indoktrinasi pada masa revolusi dan Orde Lama mengakar lebih kuat dalam diri Tapol sehingga penanaman nilai yang baru pada masa Orde Baru dianggap berbeda dan justru menyempitkan makna Pancasila.

Fase terakhir yang berjalan adalah fase eksternalisasi, fase ini melahirkan sebuah pandangan atau pemikiran subyektif yang tercipta dari sebuah perjalanan panjang tentang realitas obyektif. Dalam hal ini Tapol telah memiliki pandangan terhadap Pancasila sebagai Pandangan subyektifnya. Secara garis besar, tidak ada yang begitu berbeda tentang pandangan Tapol terhadap Pancasila. Pancasila masih dianggap sebagai dasar negara, sebuah ideologi yang lahir karena digali oleh Bung Karno berdasar watak dan sifat asli manusia Indonesia, kemudian dilengkapi dengan mengiris dua ideologi besar dunia yaitu liberalisme dan Komunisme. Meskipun begitu Tapol beranggapan bahwa Pancasila hari ini semakin menyempit ruangnya, tidak dapat diterjemahkan dengan pasti apa yang membuat Pancasila menjadi semakin menyempit dan tidak semeriah dulu dalam orang-orang memahaminya. Antusiasme masyarakat terhadap Pancasila atau hal-hal kebangsaan lainnya dianggap Tapol sebagai salah satu cerminan masyarakat yang masih menjunjung Pancasila, sementara masyarakat yang apatis ditanggapi sebagai masyarakat yang telah terdampak menyempitnya ruang Pancasila dalam hadir di kehidupan sehari-hari. Program P4 pada maa Orde Baru dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat Pancasila terbatas pada teknis pelaksanaannya, bukan sebagai konsep hidup, akan tetapi Tapol masih meyakini bahwa Pancasila sebagai sesuatu yang digali dari bangsa Indonesia sendiri akan tetap hidup dalam setiap insan Indonesia.

Saran

Pancasila adalah dasar Negara, sebuah ideologi yang digali dan diciptakan dari watak dan sifat asli bangsa Indonesia sendiri. Sudah semestinya Pancasila menjadi alat pemersatu dalam bangsa yang majemuk ini. Sebagaimana layaknya ideologi-ideologi besar di dunia, mumpelajari Pancasila dan menghasilkan tafsir atas pemikirannya sendiri adalah hal yang biasa, namun jangan sampai kita kehilangan Pancasila yang paling awal yang diciptakan menjelang kemerdekaan. Pancasila sebagai sesuatu hal yang digali dari diri bangsa Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa dimonopoli sebagian kalangan untuk menentukan pelaksanaan Pancasila yang paling benar, ditambah dengan sifat kehidupan yang dinamis.

Pancasila yang merupakan milik bersama bangsa Indonesia harusnya menciptakan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap siapapun, termasuk kepada mantan Tahanan Politik yang selama ini masih mendapat stigma buruk dan diskriminasi pada masa dulu. Pandangan Tapol tentang Pancasila sebagai hasil dari konstruksi pemikirannya membuktikan tidak ada hal yang menunjukkan Tapol bertentangan dengan Pancasila. Sehingga stigma buruk masyarakat perlu dihilangkan dan rehabilitasi nama kepada mantan Tapol sebaiknya dilaksanakan untuk mengembalikan nama baik Tapol. Pancasila sebagai ideologi juga tidak seharusnya digunakan lagi untuk alat menguasai dari pemerintah. Tidak seharusnya kita memiliki label atau memberi cap sebagaimana siapa yang lebih Pancasilais dan siapa yang tidak, karena kehidupan ini dinamis. Pandangan Tapol yang tidak beda jauh dengan banyak orang seputar Pancasila menunjukkan Tapol adalah manusia Indonesia biasa yang juga memperoleh informasi seputar Pancasila namun dengan proses yang berbeda. Oleh karena itu, mantan Tapol merupakan bagian dari kita seutuhnya dan juga tidak perlu mempertentangkan tentang Pancasila, karena hakekatnya Pancasila adalah alat pemersatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rosiha. 2007. *Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta: Obor Indonesia
- Berger, Peter I, dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir sosial Atas Kenyataan*. Penerjemah Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Budimansyah, Dasim. 2008. *Pembelajaran Pembudayaan Nilai Pancasila*. Bandung : PT Genesindo
- Craib, Ian. 1993. *Teori-teori sosial modern: dari parsons sampai habermas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Darmodihardjo, darji. 1984. *Pancasila Suatu Orientasi singkat*, Jakarta: Aries Lima
- Dinuth, Alex. 1997. *Dokumen Terpilih Sekitar G-30-S/PKI*. Jakrta: Intermassa.
- Edman, Peter. 2015. *Komunisme ala aidit: kisah partai komunis Indonesia di bawah kepemimpinan D.N. aidit 1950-1965*. Jogjakarta: Narasi.
- Krisnadi, I.G. 2001. *Tahanan Politik Pulau Buru*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moerdiono dkk. 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Notosusanto, Nugroho. 1981a. *30 tahun Indonesia merdeka: 1950-1964*. Jakarta : PT Tira Pustaka.
- Notosusanto, Nugroho. 1981b. *30 tahun Indonesia merdeka: 1965-1973*. Jakarta : PT Tira Pustaka.
- Notosusanto, Nugroho dan ismail Saleh. 1993. *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia*. Jakarta: Intermassa.
- Pitoyo dkk. 2012. *Mengurai Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: PSP Press
- Pusat Sejarah Dan Tradisi ABRI. 1994. *Bahaya Laten Komunis Jilid IV A*. Jakarta
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta: institute sejarah sosial Indonesia dan hasta mitra.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

